

DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nisa Islami

Institut Agama Islam Imam al-Ghazali (IAIIG) Cilacap

e-mail: nisaislami@iaiig.ac.id

Abstract

This paper will substantially discuss the quality assurance system in the kindergarten education unit. This matter becomes very important because the education unit of kindergarten to date hasn't yet implemented the optimal quality assurance system. Though kindergarten as the foundation of early education level is very effective role in developing intellectual, emotional, social and spiritual intelligence. Thus, the kindergarten education unit absolutely requires a serious quality management system that is managed seriously to direct and control educational programs in accordance with the policy direction, objectives, plans, and processes or quality procedures and their achievements in a sustainable manner. The implementation of quality assurance in the kindergarten education unit is done through: first, designing institutional quality assurance unit. Second, formulate the vision, mission, objectives and target institutions. Third, develop the Master Plan for Development, Strategic Plan and Operational Plan. Fourth, compile quality documents. Fifth, conduct an internal quality audit.

Keywords: Quality Assurance System, Kindergarten, Education Quality.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kebijakan nasional sebagaimana dikeluarkan pemerintah RI dalam bidang pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yakni: *pertama*, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. *Kedua*, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. *Ketiga*, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur dengan Undang-Undang. *Keempat*, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja

negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. *Kelima*, Pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Wujud nyata terhadap implementasi konstitusi di atas tampak bahwa pemerintah hingga saat ini secara serius berulang kali menerbitkan serta memberlakukan berbagai macam undang-undang serta berbagai peraturan tentang pendidikan. Salah satu produk hukum yang mengatur perihal pendidikan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain sebagai penyempurna

dari berbagai peraturan pemerintah sebelumnya, penerbitan Undang-Undang tersebut tidak lain bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang sarat dengan tantangan globalisasi yang semakin kompleks.

Apabila mutu pendidikan di Indonesia menunjukkan titik keunggulan sebagaimana pendidikan di negara lain, pastinya produk pendidikan kita akan mampu bersaing secara sportif di level internasional. Sehingga kompetensi lulusan pendidikan kita akhirnya diakui oleh negara-negara lain. Bahkan mereka mampu menguasai sektor-sektor vital pada berbagai bidang.

Atas dasar itulah, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia menjadi satu keharusan yang harus dilakukan secara serius, bertahap dan terus menerus. Sebab peningkatan mutu pendidikan di Indonesia pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan mutu dan daya saing lulusan yang diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non akademik yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Selain itu, komitmen meningkatkan mutu pendidikan telah menjadi satu bentuk kesepakatan secara internasional sebagaimana dikemukakan dalam *the World Education Forum and the Dakar Framework for Action in 2000*. Salah satu unsurnya mencakup peningkatan mutu pendidikan serta menjamin keunggulan agar hasil belajar dapat terukur dan diraih oleh semua anak, terutama dalam bidang membaca, menulis, menghitung, dan keterampilan hidup yang diperlukan (Somantri, 2009:3).

Peningkatan mutu pendidikan tidak sebatas melekat pada jenjang pendidikan tinggi yang didesain melalui *link and match* dengan dunia kerja semata. Namun peningkatan mutu

pendidikan secara serius harus dilakukan semenjak jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). Artinya peningkatan mutu pendidikan pada jenjang TK merupakan *setting* pendidikan yang mencerminkan kualitas proses dan *outcomes*. Proses mutu pendidikan di lihat dari aspek *input* yang memiliki kesiapan mental untuk mempelajari dan menguasai berbagai kompetensi. Sementara proses pembelajaran harus di dukung oleh kurikulum, guru, buku pelajaran, media, dorongan dari orang tua serta masyarakat. Adapun kualitas *outcome* berposisi sebagai produk dari rangkaian proses yang telah dijalani sebelumnya.

Untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan secara berkualitas, setiap satuan pendidikan TK perlu memiliki sistem penjaminan mutu pendidikan berikut kelembagaannya yang terkelola secara profesional. Lembaga ini berfungsi menjalankan tanggung jawab mutu pendidikan sebagaimana amanah dari Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 pasal 7 bahwa satuan atau program pendidikan diharuskan melakukan supervisi, mengawasi dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan dan atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan.

Tanpa adanya sistem penjaminan mutu yang terkelola secara profesional dan dijalankan secara serius, proses pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak sebatas berjalan apa adanya. Artinya lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak hanya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tanpa perencanaan yang jelas, tidak memiliki sistem evaluasi serta target yang terukur, hasil pendidikan tidak berbasis produk ataupun *out put* secara jelas,

miskinnya kepemilikan pedoman atau panduan sebagai pegangan sekolah secara terstandar, tidak adanya sistem audit mutu secara internal dan eksternal, bahkan proses pembelajaran sebatas berjalan apa adanya tanpa memiliki ciri khas dan keunggulan yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik.

Dari uraian di atas, mendesain sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak menjadi satu keniscayaan. Sehingga pendidikan Taman Kanak-Kanak tidak sebatas dipahami sebagai sistem pendidikan pelengkap bagi anak usia pra sekolah. Namun posisi dan peran vital pendidikan TK menjadi penentu dalam menanamkan dan mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, sosial serta spiritual.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam hal ini adalah kajian literatur, dimana penulis mengkaji berbagai data dan informasi dari berbagai sumber terkait dengan topik yang dipilih. Sumber yang digunakan antara lain buku, jurnal dan sumber informasi lainnya terkait dengan permainan sistem penjaminan mutu di satuan Taman Kanak-Kanak (TK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Saat ini, pengelolaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak terbilang masih sebatas wacana yang belum jelas arah, teknis serta tujuannya. Perihal ini dilatarbelakangi satuan pendidikan TK dianggap sebagai lembaga pendidikan bermain, berkreativitas, serta berbagai kegiatan tidak penting. Berbeda dengan

perguruan tinggi, penjaminan mutu turut menentukan kualitas dan keterpakaian alumninya di dunia global. Terlebih persaingan antar perguruan tinggi mutlak memerlukan sistem penjaminan mutu yang terkelola secara berkualitas. Padahal mutu pendidikan idealnya mendapat perhatian yang sama tanpa membedakan jenjang, strata ataupun tingkat usia yang dilayaninya. Harapannya pendidikan di Indonesia mampu menjawab problem kehidupan secara cepat, tepat dan solutif.

Penjaminan mutu pendidikan merupakan satu program terencana yang dikelola dan diimplementasikan secara profesional agar proses pendidikan berjalan sekaligus menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas. Secara teoritik penjaminan mutu (*quality assurance*) sebagaimana dikemukakan Sallis di pahami sebagai:

Quality assurance is different from quality control. it is before and during the event process concerned to prevent faults occurring in the first place. Quality assurance is about designing quality into the process to attempt to ensure that the product is produced to a predetermined specification. Put simply, quality assurance is a means of producing defect-and fault-free product. The aim in the words of Philip B. Crosby is zero defects. Quality assurance is about consistently meeting product specification or getting things right first time, every time. The quality of the good or service is assured by there being a system in place, known as a quality assurance (QA) system, that lays down exactly how production should take place and to what standars. Quality standars are maintained by following the procedures laid down in the QA system. Quality assurance is the responsibility of the workforce, usually working in quality circles or teams,

rather than inspector, although inspection can have a role to play in quality assurance (Suharsaputra, 2015:303).

Definisi di atas setidaknya menegaskan bahwa penjaminan mutu secara prinsip kerja berbeda dengan kontrol mutu. Penjaminan mutu lebih diorientasikan pada perencanaan, proses atau pelaksanaan mutu itu berlangsung guna mencegah kesalahan atau kekeliruan dalam proses. Sehingga melalui penjaminan mutu tercipta produk-produk yang berkualitas, layanan yang memuaskan, terdapatnya sistem sesuai dengan standar yang diterapkan. Semua itu dapat dicapai melalui pola kerja yang bertanggung jawab, kerjasama yang sinergis dalam sebuah tim, sekaligus sistem kerja sesuai dengan perencanaan. Sehingga melalui penjaminan mutu, meminjam istilahnya Crosby, diperolehnya produk atau layanan yang *zero defects* yakni nol kesalahan atau kesempurnaan produk dan layanan yang memuaskan.

Senada dengan pengertian di atas, Sani dkk, juga mengemukakan penjaminan mutu merupakan proses pengelolaan untuk mengarahkan dan mengendalikan satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan, sasaran, rencana, dan proses atau prosedur mutu, serta pencapaiannya secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) (Sani, 2015:20).

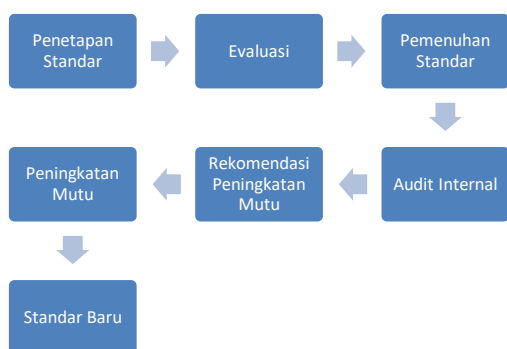
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu sekolah ataupun satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak menjadi bagian dari upaya memperbaiki mutu kinerja organisasi, baik secara institusi ataupun program kerja yang direncanakan, dijalankan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan. Artinya penjaminan mutu pendidikan merupakan aktualisasi

organisasi atau institusi sekolah untuk melakukan perbaikan bagi peningkatan mutu pendidikan secara konsisten dan dinamis. Dalam istilah lain, sistem penjaminan mutu diperlukan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sehingga sistem penjaminan mutu ini akan menjamin mutu *input*, mutu proses dan mutu *output* dari pengelolaan sekolah.

Penjaminan mutu pendidikan sebagai suatu pendekatan dalam manajemen mutu dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Penjaminan mutu internal di dasarkan pada analisis atau evaluasi diri untuk mengetahui posisi lembaga dalam menyelenggarakan peran dan tugasnya, Hasil penilaian secara internal ini akan menjadi dasar untuk merencanakan mutu melalui kebijakan mutu sekolah atau TK dengan prinsip perbaikan berkesinambungan. Sedangkan penilaian secara eksternal dapat dilakukan melalui akreditasi ataupun penilaian yang lain seperti ISO 9001: 2015 serta lembaga penilai mutu lainnya.

Penjaminan mutu sampai kapanpun menempati posisi yang amat penting. Sebab penjaminan mutu pendidikan secara substantif bertujuan diantaranya: *pertama*, memperjelas visi, misi dan tujuan sekolah pada pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Kedua*, memungkinkan semua yang berkepentingan untuk memikirkan sistem yang tepat untuk sekolah. *Ketiga*, memperjelas siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. *Keempat*, memiliki orientasi untuk pencapaian standar yang ditetapkan. *Kelima*, tersedia sistem untuk mengecek apakah proses berjalan sesuai dengan rencana. *Keenam*, ada tindakan koreksi jika ditemukan kesalahan (Sani, 2015:151-152).

Selanjutnya, proses penjaminan mutu sekolah pada dasarnya memuat empat aspek pokok yakni: penetapan standar, pemenuhan standar, evaluasi secara terus menerus, serta peningkatan mutu. Dari empat unsur pokok tersebut, dapat ditarik siklus penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:



Bagan I :
Siklus Penjaminan Mutu

Penjelasan dari bagan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar

Standar merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah dan merupakan dokumen tingkat mutu satuan pendidikan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Standar tersebut ditetapkan, diperiksa, dan ditingkatkan secara periodik dan berkelanjutan oleh satuan pendidikan. Komite sekolah sebagai pelanggan dari layanan pendidikan dapat berperan dalam mengusulkan standar mutu.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai ketercapaian tujuan, yang dalam hal ini adalah tingkat ketercapaian standar. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kesenjangan dan permasalahan yang terjadi di

sekolah dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada kasus penjaminan mutu sekolah, evaluasi dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau tim yang dibentuk oleh kepala sekolah.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan organisasi dan prosedur pelaksanaan pada tingkat satuan pendidikan serta seluruh bagian organisasi satuan pendidikan yang bersangkutan untuk masing-masing standar. Pelaksanaan ini juga memuat peran dan tugas masing-masing unit atau bagian organisasi maupun tanggung jawab personal yang diberikan, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia untuk melaksanakan penjaminan mutu. Pelaksanaan standar ini pada umumnya disesuaikan dengan program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis evaluasi diri sekolah.

4. Audit Internal

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas kepatuhan pelaku kegiatan di satuan pendidikan terhadap prosedur yang dilakukan secara internal, yang dilakukan oleh tim mutu sekolah. Tim mutu sekolah dipilih dari dewan guru dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Audit internal juga dapat dilakukan dengan bantuan atau difasilitasi oleh LPMP, dalam kapasitasnya sebagai lembaga penjaminan mutu, untuk memastikan tingkat implementasi dan ketercapaian standar. Berdasarkan temuan hasil kegiatan audit mutu internal di atas, sekolah bersama komite sekolah atas bimbingan LPMP menyusun rencana perbaikan.

5. Rekomendasi Peningkatan Mutu
Berdasarkan temuan hasil kegiatan audit mutu internal, unit penjaminan mutu menyampaikan rekomendasi peningkatan mutu. Rekomendasi ini merupakan bukti atas pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah.
6. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
Berdasarkan rekomendasi peningkatan mutu, satuan pendidikan dapat melakukan tindak lanjut dengan menentukan langkah upaya perbaikan terhadap standar jika masih terdapat kekurangan dalam pencapaian standar. Upaya tersebut disertai dengan perbaikan sistem manajemen organisasi maupun prosedur pelaksanaan penjaminan mutu. Upaya peningkatan mutu tersebut dilakukan secara periodik dan berkelanjutan secara konsisten sehingga akan terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Desain Penjaminan Mutu pada Satuan Pendidikan TK

Secara teknis, sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat dilakukan dengan mendesain beberapa aspek sebagai berikut:

1. Mendesain Kelembagaan Unit Penjaminan Mutu

Desain kelembagaan berbentuk Unit Penjaminan Mutu pada satuan Taman Kanak-Kanak dibentuk sesuai dengan struktur kebijakan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pembentukan kelembagaan Unit Penjaminan Mutu pada satuan pendidikan Taman

Kanak-Kanak hingga saat ini belum terdapat regulasi secara baku. Meskipun demikian bukan berarti kelembagaan ini tidak perlu diciptakan. Namun desain kelembagaan unit penjaminan mutu dapat diserahkan secara total kepada pihak yayasan ataupun penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan. Yang terpenting unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak terdiri atas tim pengembang dokumen serta auditor yang pelaksanaan sistem kerjanya di bawah koordinasi seorang penanggung jawab atau kepala unit. Adapun semua pekerjaan penyusunan dokumen mutu serta pelaksanaan audit internal dilakukan secara tim dari semua tenaga pendidik. Artinya guru diberikan tugas tambahan dalam mengembangkan mutu akademik dan non akademik disetiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak. Sementara pelaporan hasil kerja pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan oleh tenaga kependidikan.

Struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat disusun dalam bentuk sebagai berikut:



Bagan II :
Struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak secara terstruktur bertanggung jawab langsung kepada kepala TK. Unit Penjaminan Mutu secara legal memperoleh kewenangan melaksanakan tanggung jawab mutu secara otonom melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Sekolah atau Yayasan. Apabila Unit Penjaminan Mutu dikelola oleh guru, maka guru yang bersangkutan berstatus memperoleh tugas tambahan baik sebagai tim pengembangan dokumen standar mutu ataupun sebagai auditor. Semua itu dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, guna meningkatkan mutu satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.

Adapun secara tugas pokok dan instruksi (Tusi), kepala unit penjaminan mutu bertugas sebagai penanggung jawab serta mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Kepala unit membawahi dua bidang kerja yakni tim penyusun dokumen standar mutu serta auditor audit mutu.

2. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)

Bagi satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, visi memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan dan karakteristik lembaga tersebut. Visi adalah bagian penting dari setiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak sekaligus sebagai langkah menentukan masa depannya. Secara umum visi juga dapat dipahami sebagai cita-cita yang melangit sekaligus sebagai arah jangka panjang satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak. Selain itu, visi menurut ahli juga kerap didefinisikan sebagai jawaban atas pertanyaan apa

yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Apa yang ingin dicapai oleh setiap satuan Taman Kanak-Kanak pasti berbentuk tujuan jangka panjang. Sehingga pencapaian visi tersebut memerlukan waktu relatif cukup lama.

Selanjutnya beberapa hal yang harus ada dan tidak ada dalam perumusan visi pada satuan TK sebagai berikut (indarti dkk, 2016:13):

No	Yang Harus Ada	Tidak Boleh Ada
1	Pernyataan visi menjadi gambaran yang jelas tentang suatu organisasi.	Pernyataan visi tidak boleh memberikan gambaran yang kabur atau tidak lengkap.
2	Pernyataan visi memberikan gambaran strategis dan mengarah pada masa depan.	Pernyataan visi tidak terpaku pada kondisi saat ini.
3	Pernyataan visi merupakan pegangan bagi para pembuat keputusan	Pernyataan visi tidak menggunakan bahasa yang terlalu luas.
4	Pernyataan visi menggunakan bahasa yang flksibel sesuai dengan berbagai kondisi/konteks	Pernyataan visi tidak dinyatakan dalam pernyataan yang membosankan, tetapi yang memotivasi dan menginspirasi.
5	Pernyataan visi harus mampu menjadi dasar	Pernyataan visi tidak bersifat

	apa yang ingin dicapai organisasi dari waktu ke waktu dan mampu menunjukkan kemajuan yang terukur.	umum, tetapi hanya berlaku untuk organisasi yang dimaksudkan saja
6	Pernyataan visi dapat mengindikasikan kepentingan jangka panjang pemangku kepentingan	Pernyataan visi tidak mengandalkan pernyataan superlatif.
7	Pernyataan visi harus mudah diingat	Pernyataan visi tidak terlalu singkat.

Setelah visi satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak terumuskan, langkah berikutnya adalah menyusun misi. Misi merupakan beberapa pernyataan yang disusun sebagai upaya atau langkah konkret yang harus dilakukan guna mensukseskan visi suatu organisasi. Pernyataan misi secara teoritik harus memuat: *pertama*, menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. *Kedua*, secara eksplisit misi mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. *Ketiga*, mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi (Calam dan Qurniati, 2016:57).

Selaras dengan pendapat di atas, Mc Ginnis mengemukakan dalam merumuskan pernyataan misi, setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan diantaranya: a) Pernyataan misi mendefinisikan apa dan siapa, serta apa yang ingin

dicapai organisasi tersebut. b). Pernyataan misi membedakan satu organisasi dari organisasi lain. c). Pernyataan misi menjadi kerangka kerja untuk mengevaluasi aktivitas saat ini dan di masa depan. d). Pernyataan misi dinyatakan dalam definisi yang jelas sehingga dipahami banyak orang dalam organisasi. Selain itu, secara spesifik dalam menyusun pernyataan misi, satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak perlu memperhatikan beberapa aspek pokok seperti: siapa pelanggan atau pengguna satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak?, produk atau layanan utama yang ditawarkan, serta aspek pasar yakni secara geografis, di mana TK berkompetisi (Calam dan Qurniati, 2016:57).

Apabila pernyataan visi dan misi sudah terumuskan secara ideal, satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak perlu menyusun pernyataan tujuan dan sasaran secara jelas dan terukur. Tujuan pada hakikatnya merepresentasikan hasil atau sesuatu yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak atas strategi yang telah dijalankan. Melalui tujuan satuan pendidikan yang jelas, akhirnya akan tersusun sasaran serta pengembangan perencanaan guna mensukseskan visi yang telah dirumuskan. Sasaran harus dipahami sebagai ukuran pencapaian dari tujuan institusi. Selain itu sasaran mencerminkan berfungsinya *out comes* dari semua program dalam satuan pendidikan. Sehingga sasaran harus dirumuskan secara jelas, terukur serta dilengkapi dengan target kinerja.

Secara teknis, perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) idealnya dilakukan melalui beberapa

tahapan diantaranya: kepala TK membentuk tim penyusun VMTS dengan memilih orang-orang yang kompeten serta mampu menganalisa kondisi, tantangan, serta peluang lembaga. Tahap berikutnya tim penyusun merumuskan draf rencana VMTS dengan mempertimbangkan visi misi dari lembaga induknya (yayasan atau dinas pendidikan yang menaunginya).

Draf rumusan yang telah disusun kemudian dibahas dan dimatangkan secara serius bersama dengan berbagai pemangku kepentingan serta masyarakat pengguna. Pembahasan ini seharusnya melibatkan pakar agar perumusan VMTS tersusun secara optimal sesuai dengan kondisi, arah, ciri khas serta tingkat kemampuan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan. Pada akhirnya rumusan VMTS yang telah disusun disetujui dan disahkan oleh kepala sekolah sekaligus ditetapkan sebagai visi misi lembaga. Tahap paling akhir adalah sosialisasi VMTS secara luas kepada berbagai pihak terkait seperti guru, tenaga kependidikan, masyarakat pengguna dan sebagainya melalui berbagai media cetak, elektronik baik secara *online* maupun *offline*.

3. Menyusun RIP, Renstra dan Renop

Setelah VMTS tersusun sesuai dengan kondisi dan keinginan yang dikehendaki lembaga, tahap berikutnya menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) dalam kisaran waktu 25-30 tahun, Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan serta Rencana Operasional (Renop) jangka waktu 1 tahunan.

RIP merupakan satu bentuk perencanaan strategis yang desain

oleh satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam periode waktu tertentu serta disusun berdasarkan analisis lingkungan secara internal dan eksternal, yang meliputi skenario, perencanaan yang disusun sebagai dasar penyusunan RIP, arah pengembangan (*road map*), serta indikator kinerja yang digunakan.

Secara umum RIP harus memuat lima komponen minimal diantaranya (indarti dkk, 2016:3), *pertama*, perumusan nilai dasar, misi dan visi. *Kedua*, perumusan tujuan jangka panjang. *Ketiga*, penilaian terhadap lingkungan internal dan eksternal. *Keempat*, penentuan strategi alternatif. *Kelima*, pemilihan strategi yang sesuai. Kelima aspek tersebut merupakan standar minimal komponen yang masuk dalam RIP. Akan tetapi secara praktik, setiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat menyesuaikan sesuai kebutuhannya.

Adapun secara normatif, penyusunan RIP Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak harus memperhatikan analisis strategis, nilai dasar, misi, visi, identifikasi isu, tujuan, strategi yang digunakan, serta indikator kinerja. Sehingga dengan menggunakan dasar tersebut, penyusunan RIP pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat dibagi dalam beberapa bab dan subbab sebagai berikut:

Pertama, bab I pendahuluan memuat: latar belakang, dasar hukum, serta sistematika penulisan. Pada poin latar belakang, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk menyusun RIP satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak diantaranya: a) Kondisi dan masalah yang dihadapi satuan TK saat ini. Masalah merupakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dapat

dicapai dan apa yang terjadi saat ini. b) Cita-cita atau mimpi yang ingin dicapai oleh satuan TK. Cita-cita ini memuat impian ke depan yang ingin diwujudkan oleh perguruan tinggi. c) Peran penyusunan RIP untuk keberhasilan mencapai cita-cita atau tujuan satuan pendidikan TK. Penjelasan mengenai alasan penyusunan RIP dan kegunaan RIP dalam pengembangan satuan TK. Misalnya, dengan adanya RIP, arah pengembangan satuan TK lebih terorganisir sehingga mempermudah pengembangan yang akan dilakukan oleh satuan TK tersebut. 4) Pihak yang terlibat dalam penyusunan RIP. Bagian ini menjelaskan tentang siapa yang berperan dalam penyusunan RIP. Hal ini berguna untuk mengetahui dari mana ide pengembangan tersebut berasal dan untuk mencapai kesepakatan. Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai pijakan penyusunan RIP dapat berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Yayasan yang diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan dari yayasan dan sejenisnya.

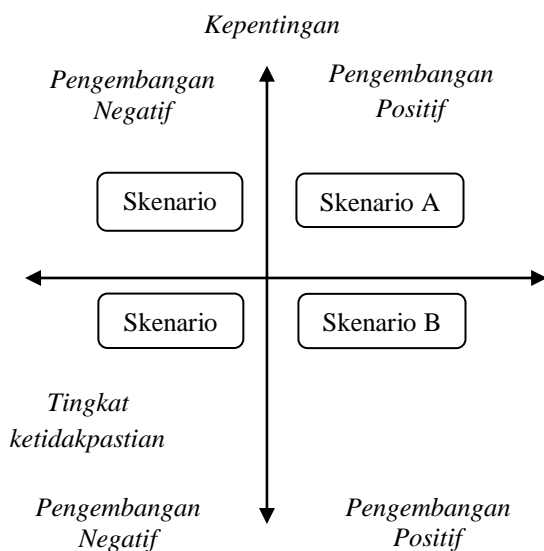
Kedua, bab II memuat profil lembaga meliputi sejarah satuan pendidikan TK, nilai dasar, misi, visi, tujuan. Perihal ini bersifat umum dan semestinya sudah disusun sebelum RIP dirumuskan. *Ketiga*, bab III memuat analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis ini menguraikan perihal aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Aspek kekuatan berarti sesuatu yang dimiliki oleh satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang mampu menjadikan lembaga tersebut memiliki posisi tawar yang lebih melangit dibandingkan dengan lembaga pendidikan anak yang lain.

Sementara aspek kelemahan merupakan aspek-aspek yang tidak menguntungkan organisasi ataupun sesuatu yang belum dimiliki oleh satuan organisasi. Adapun aspek peluang merupakan kesempatan yang dimiliki satuan pendidikan TK untuk dapat bertahan sekaligus memiliki keunggulan serta kekhasan secara kompetitif. Peluang ini pada hakikatnya menjadi faktor pembentuk strategi sekaligus kesempatan dalam meraih impian setiap satuan pendidikan TK.

Berikutnya adalah analisis terhadap ancaman yakni berbagai kondisi yang muncul dari luar, pesaing sekaligus harus diwaspadai keberadaan dan peran aktifnya di luar satuan pendidikan TK. Beberapa ancaman yang tampak dan harus mendapat perhatian khusus misalnya: satuan pendidikan TK yang lain telah mengimplementasikan teknologi informasi yang lebih canggih dan modern, biaya lebih murah, ketidakstabilan kondisi ekonomi dan politik, dan sejenisnya. Untuk melakukan analisa terhadap kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman, satuan pendidikan TK harus merumuskan berbagai pendekatan secara tepat sebagai alternatif untuk meningkatkan kelebihan, mencari solusi terhadap ancaman dan kelemahan sekaligus memaksimalkan peluang yang ada.

Keempat, bab IV memuat skenario perencanaan dan arah pengembangan. Penyusunan skenario perencanaan dan arah pengembangan harus didasarkan pada analisis terhadap lingkungan. Secara lebih spesifik, skenario perencanaan digunakan untuk memahami peluang dan ancaman

yang datang dari lingkungan eksternal dan menyelaraskannya dengan kondisi sumberdaya serta kapabilitas internal yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dalam menyusun skenario perencanaan, satuan pendidikan TK dapat menggunakan matriks skenario perencanaan yang terdiri dari empat kuadran untuk menggambarkan empat skenario masa depan yang berbeda-beda. Adapun gambar matrik skenario perencanaan sebagai berikut:



Bagan III :
Matrik Skenario Perencanaan

Setelah disusun skenario perencanaan, tahap berikutnya menyusun arah pengembangan (*road map*) (indarti dkk, 2016:26). Penyusunan *road map* dilakukan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan membuat tahapan-tahapan pokok. Adapun setiap tahapan tentunya harus memuat target capaian, rentang waktu, sekaligus mengarah pada bidang tertentu. Tahapan ini mencakup beberapa bidang yang direncanakan. Sedangkan indikator kinerja digunakan untuk mengetahui apakah

implementasi dari proses pengembangan telah sesuai dengan target yang ingin dicapai. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan pengembangan yang dilakukan. Penetapan indikator kinerja didasarkan oleh target pada setiap tahapan. *Keenam*, bab VI berisi simpulan dan rancangan implementasi(indarti dkk, 2016:6).

4. Penyusunan Dokumen Mutu

Dokumen standar mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak pada hakikatnya dapat disusun berdasarkan standar minimal berbasis akreditasi. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan berbagai dokumen mutu idealnya juga dikembangkan secara lengkap sebagai pedoman kerja sekaligus dasar kebijakan serta tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

Beberapa dokumen mutu yang perlu disusun dan dikembangkan pada setiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak antara lain: *pertama*, dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP). *Kedua*, dokumen Rencana Strategis (Renstra). *Ketiga*, dokumen Rencana Operasional (Renop). *Keempat*, dokumen pernyataan mutu. *Kelima*, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). *Keenam*, dokumen Instruksi Kerja (IK). *Ketujuh*, dokumen kurikulum. *Kedelapan*, dokumen Pengembangan dan evaluasi kurikulum. *Kesembilan*, dokumen pedoman akademik. *Kesepuluh*, pedoman tenaga pendidik. *Kesebelas*, pedoman bagi peserta didik. *Keduabelas*, dokumen materi *parenting*. *Ketigabelas*, dokumen pengembangan bakat, minat dan kreativitas anak. *Keempatbelas*, laporan

perkembangan psikologi atau kejiwaan anak. *Kelimabelas*, dokumen kebijakan TK, dan sejenisnya. Berbagai dokumen di atas secara prinsipil tidak sebatas dibuat dan didokumentasikan sebagai kitab suci tak tersentuh. Namun semua dokumen mutu tersebut benar-benar dijadikan sebagai pedoman terstandar sekaligus sandaran pelaksanaan kerja dan penjaminan mutu di setiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak.

5. Audit Mutu Internal

Pelaksanaan audit mutu internal pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak minimal dilakukan satu tahun sekali. Secara teknis audit mutu internal dilaksanakan melalui empat tahap yakni: persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil audit serta tindak lanjut. Persiapan audit mencakup: *pertama*, kepala unit penjaminan mutu TK mempersiapkan penugasan terhadap auditor untuk pelaksanaan audit. *Kedua*, tim auditor melakukan survey pendahuluan. *Ketiga*, tim auditor menyusun program kerja audit. Ketua tim audit memilih standar apa saja yang akan diaudit, siapa saja yang akan diaudit, supervisi serta keluhan yang dikemukakan oleh pelanggan (siswa atau orang tua siswa).

Secara administratif, hal terpenting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan persiapan audit adalah kepala TK harus menerbitkan surat tugas atau SK tentang pelaksanaan audit dan tim auditor. Perihal ini dimaksudkan sebagai sandaran serta dasar pelaksanaan audit mutu internal berlangsung.

Pada tahap pelaksanaan audit mencakup tiga tahapan yakni: melakukan evaluasi dokumen, melakukan uji persiapan serta menganalisis temuan dan membuat rekomendasi. Pelaksanaan audit dilakukan dengan mengkaji ulang dokumen sekolah, melakukan wawancara, diskusi dan konsultasi, observasi pekerjaan secara langsung, serta melakukan pengujian sumber daya dan fasilitas yang dimiliki. Pada saat pelaksanaan audit berlangsung, auditor harus sudah menyusun *checklist* audit secara komprehensif. *Checklist* ini berisi pertanyaan untuk mendapatkan berbagai data sekaligus fakta riil di lapangan.

Analisis hasil audit dilakukan setelah proses pelaksanaan audit berlangsung. Analisis ini mencakup akar masalah guna menentukan penyebab terjadinya permasalahan, kemudian mengajukan rekomendasi atau saran untuk tindakan koreksi. Adapun hasil temuan dapat dikategorikan dalam penilaian ketidaksesuaian dan observasi. Penilaian ketidaksesuaian (KTS) terdiri atas klasifikasi berat dan ringan. Sementara kategori observasi (OB) merupakan temuan ringan yang memungkinkan untuk dapat segera diperbaiki.

Pasca dilakukan analisis hasil audit, tahap pelaksanaan audit mutu internal selanjutnya adalah verifikasi dan kesepakatan hasil audit. Apabila tahap verifikasi dan kesepakatan hasil audit ini telah selesai, tahap berikutnya menyusun laporan hasil audit mutu internal. Laporan hasil audit mutu internal memuat semua penilaian auditor terhadap pelaksanaan tugas pokok, ketaatan terhadap peraturan serta memuat berbagai temuan dan rekomendasi

tindak lanjut. Langkah terakhir proses audit mutu internal adalah melakukan tindak lanjut hasil audit yaitu melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi atau tindakan koreksi serta mengevaluasi proses audit.

Pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak saat ini menjadi suatu keniscayaan. Secara teknis pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak relatif masih membingungkan. Sebab implementasi penjaminan mutu secara umum belum berlangsung secara total di setiap satuan pendidikan TK. Untuk itu, kepala sekolah beserta dewan guru perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain, memperkuat *benchmarking*, studi banding, dan hasilnya dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan dalam merumuskan sistem penjaminan mutu di tempat kerjanya. Dengan demikian, sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak akan dapat terealisasi secara mudah, cepat dan tepat guna meningkatkan mutu pendidikan TK secara keseluruhan.

Hambatan dan Tantangan Sistem Penjaminan Mutu di TK

Tradisi mutu di setiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak terbilang belum terealisasi secara terencana dan sempurna. Hanya beberapa satuan pendidikan Taman-Kanak-Kanak yang telah menggagas sistem penjaminan mutu pendidikan. Selebihnya mayoritas satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak secara umum masih menjalankan sistem pendidikan dan pembelajaran sebatas sebagai

proses rutinitas tanpa memperhatikan standar mutu yang harus dicapai secara minimal.

Secara teknis, beberapa faktor yang menghambat sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak diantaranya:

1. Kebijakan Kepala TK tidak Berbasis Mutu

Gagasan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak secara formal menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Perihal tersebut disebabkan komando peningkatan mutu secara mutlak berada di bawah kepala sekolah. Sehingga secara ideal seorang kepala sekolah hendaknya memiliki komitmen mutu secara utuh untuk dapat diimplementasikan seoptimal mungkin di institusinya.

Akan tetapi secara realitas kebijakan peningkatan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak belum secara sempurna diperankan oleh kepala sekolah. Hal tersebut dimungkinkan rendahnya pemahaman kepala sekolah terhadap konsep mutu serta tidak dipahaminya sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak. Perihal tersebut secara operasional menjadi faktor penghambat utama berlangsungnya sistem penjaminan mutu TK. Untuk itu menjadi satu bentuk rekomendasi bagi Dinas Pendidikan khususnya bidang PAUD-TK agar kerap mensosialisasikan konsep penjaminan dan pengembangan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak. Sehingga setiap kepala TK memahami serta wajib mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sebagai bagian dari

tanggung jawab atas kepemimpinannya.

Selanjutnya kewajiban terhadap implementasi penjaminan mutu di atas dapat terealisasi melalui kerjasama serta komunikasi secara sinergis antar satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, organisasi profesi dan sejenisnya. Artinya setiap satuan pendidikan TK disarankan untuk memperkuat kerjasama, komunikasi serta *benchmarking* khususnya dalam perihal penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak.

2. Rendahnya komitmen tenaga pendidik

Sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh peran serta seluruh tenaga pendidik. Artinya guru sebagai tenaga pendidik memegang peranan sangat vital dalam merencanakan, memproses hingga mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Akan tetapi secara implementatif guru lebih menyibukan diri pada proses pengajaran semata. Sementara peningkatan mutu pendidikan kurang begitu diperhatikan. Terlebih guru-guru yang sudah menerima hak berupa tunjangan sertifikasi pendidik kerap disibukan pada pelaporan beban kerja guru secara administratif. Ruh mutu dalam pendidikan semakin hari semakin terkikis. Akhirnya guru lebih memikirkan orientasi secara materialistik. Padahal sikap lebih mementingkan aspek materialistik selain sebagai sikap memalukan juga sangat menghambat mutu pendidikan (Aziz, 2016:179).

3. Rendahnya Tradisi Disiplin Guru dan Tenaga Kependidikan

Setiap guru, kepala sekolah ataupun tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak cenderung terlihat lebih santai dibandingkan dengan lembaga pendidikan di atasnya. Proses pembelajaran di TK secara waktu dilakukan tidak seketat layaknya pembelajaran di tingkat SD hingga SMA. Begitu juga dengan jam pulang sekolah, proses pembelajaran di TK hanya berlangsung beberapa jam semata. Terkecuali satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang menerapkan program *full day school*. Sehari penuh anak-anak berada di sekolah.

Atas keberlangsungan proses pembelajaran di atas, menjadikan kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sering kali bermalas-malasan serta tidak memiliki disiplin tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran. Terlebih mereka yang masih berstatus sebagai guru honor. Mereka sering kali disibukan dengan profesi lain yang cukup menguras tenaga dan waktu. Sehingga profesi sebagai guru lebih dijadikan sebagai profesi sampingan. Sementara profesi lainnya dijadikan sebagai profesi utama karena secara finansial lebih menopang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Kondisi ini mengantarkan seorang guru kehilangan jati dirinya sebagai pendidik murni. Kepribadian tulusnya sebagai seorang guru sudah luntur akibat lebih menggantungkan dirinya pada aspek material.

Rendahnya tradisi disiplin ini menjadikan sumber daya manusia di

setiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak tidak mampu menghasilkan produk kreativitas apapun. Rendahnya tradisi disiplin menjadikan dirinya sebagai guru tidak bermutu. Pada akhirnya guru tidak bermutu tidak mampu bersaing secara global. Sehingga rendahnya kedisiplinan diri memiliki linieritas terhadap rendahnya mutu pendidikan disetiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak.

4. Lemahnya Pemberian Reward and Punishment

Dalam konteks penjaminan mutu, kerja keras yang beriringan dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas belum tentu mendapatkan *reward* secara langsung dan setimpal dari institusi setempat. Terlebih satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang masih memiliki kendala berupa anggaran operasional terbilang belum mampu memberikan kesejahteraan secara lebih terhadap SDM-nya. Apalagi pekerjaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak masih terbilang sebagai pekerjaan sambil lalu. Sehingga mayoritas lembaga belum mampu memberikan *reward* terhadap prestasi kerja mutu ataupun *punishment* terhadap SDM yang tidak mampu bekerja secara berkualitas.

5. Menyepelekan pendidikan TK

Mayoritas masyarakat menganggap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak sebatas sebagai tempat bermain, bernyanyi dan mewarnai. Proses pembelajaran seperti itu masih dianggap sebagai kegiatan sederhana yang tidak memerlukan sistem penjaminan mutu. Padahal lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak menurut ahli

sebagai pondasi terhadap keberhasilan pendidikan pada jenjang berikutnya. Begitu pula dengan kondisi kecerdasan anak sebagaimana dikenal dengan istilah *golden age* (usia emas). Masa ini harus dikelola secara serius dan berkualitas. Sehingga penanaman pondasi awal dapat kuat, kokoh, serta berkualitas.

Atas dasar itulah, menyepelekan sistem pembelajaran dan sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagai satu bentuk kekeliruan terbesar. Untuk itu, apabila sistem penjaminan mutu TK sudah berjalan secara optimal, masyarakat tidak lagi menyepelekan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagai lembaga pendidikan main-main. Sebab seiring berjalannya penjaminan mutu, anak-anak akan mampu meningkatkan prestasi, lebih kreatif serta mampu menghasilkan berbagai produk unggulan yang diakui secara nasional bahkan internasional.

Selain itu, pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak menghadapi tantangan yang sangat besar. Tantangan tersebut tampak pada beberapa kondisi antara lain: *pertama*, korban kekerasan serta pelecehan seksual masih banyak menimpa anak usia dini. *Kedua*, bobroknya karakter manusia Indonesia salah satunya diakibatkan oleh lembaga pendidikan pendidikan anak usia dini dianggap belum mampu berperan secara optimal dan maksimal dalam menanamkan akhlak, karakter, budi pekerti yang luhur. *Ketiga*, usia anak dipercaya sebagai usia suci hati maupun pikirannya. Sehingga anak usia dini sebagai masa paling aktif dan kreatif dalam mengembangkan kecerdasan

secara intelektual, emosional, sosial dan spiritual. Pengembangan ini tentunya memerlukan peran pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bermutu secara total.

Keempat, lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak semakin lebih diminati oleh masyarakat secara luas. Artinya masyarakat sudah memiliki kecerdasan dalam memilih lembaga pendidikan untuk putra-putrinya. Perihal ini menjadikan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bermutu dan berkualitas lebih memiliki posisi tawar yang tinggi serta lebih diminati oleh masyarakat secara luas. Meskipun satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bermutu selaras dengan pembiayaan yang cukup mahal. Sementara pendidikan Taman Kanak-Kanak yang tidak bermutu lambat laun ditinggalkan oleh masyarakat. Sehingga implementasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak mutlak diperlukan keberadaannya.

SIMPULAN

Keberadaan sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak sampai kapan pun menjadi suatu keniscayaan. Perihal tersebut lebih didasarkan bahwa pendidikan saat ini telah mengalami pergeseran paradigma dari pola tradisional menuju era global dan digital. Perubahan tersebut turut melatarbelakangi perlunya sistem penjaminan mutu dalam meningkatkan kualitas pendidikan semenjak jenjang Taman Kanak-Kanak.

Selain lahirnya perubahan secara paradigmatic, pendidikan Taman Kanak-Kanak kini menghadapi tantangan yang cukup berat. Tantangan dari aspek karakter, pengembangan

intelektual, pengenalan jati diri dan sebagainya menjadi sesuatu yang harus dipikirkan secara serius oleh setiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak. Atas dasar itulah, setiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak harus mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sehingga jenjang pendidikan terendah ini mampu menjadi pondasi ideal terhadap pengembangan kecerdasan anak selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, 2016. Safrudin. *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi: Koreksi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Calam, Ahmad & Qurniati, Amnah, 2016. "Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan", *Jurnal Saindikom*, Vol.15, No. 1,
- Indarti, Nurul dkk, 2016. *Panduan Penyusunan RIP Perguruan Tinggi Muhammadiyah /'Aisyiyah (PTMA)*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2005. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI.
- Sani, Ridwan Abdullah dkk, 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Somantrie, Hermana, 2009. "Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 15 Edisi Khusus 1.
- Suharsaputra, Uhar, 2015. *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Refika Aditama.